



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.803, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi BOS.  
Pedoman. Tahun Anggaran 2012.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 201/PMK.07/2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) BOS dialokasikan kepada daerah provinsi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
- (3) Sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT), termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
- (4) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 untuk SD dan SMP per siswa per tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012, adalah sebagai berikut:
  - a. Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SD/SDLB di kabupaten/kota; dan
  - b. Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) BOS Tahun Anggaran 2012 merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- (2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2012 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Perubahan Tahun Anggaran 2012 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.

- (3) BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk BOS Daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp23.594.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah) disediakan untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. BOS yang dialokasikan ke kabupaten/kota melalui provinsi sebesar Rp22.441.115.420.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh satu miliar seratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 36.579.003 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga) siswa yang terdiri dari 27.153.667 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) siswa SD dan 9.425.336 (sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) siswa SMP; dan
  - b. Dana Cadangan BOS (*Buffer fund*) sebesar Rp1.153.684.580.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Rincian alokasi BOS per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian alokasi BOS untuk masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan data nama sekolah dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2012.
- (4) Dana Cadangan BOS (*Buffer fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pencairannya dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi kurang salur BOS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah.

- (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan secara triwulanan, yaitu:
  - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2012;
  - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2012;
  - c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2012; dan
  - d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012.
- (3) Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari alokasi BOS.
- (4) Penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan secara triwulanan, yaitu:
  - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir;
  - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir;
  - c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan
  - d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulannya.
- (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rincian alokasi BOS masing-masing sekolah per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

#### Pasal 6

Gubernur wajib membuat dan menyampaikan:

- a. Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- b. Laporan Realisasi Penyerapan BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

### Pasal 7

- (1) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran.
- (2) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
  - a. pada akhir bulan Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;
  - b. pada akhir bulan Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;
  - c. pada akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III; dan
  - d. pada akhir bulan Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.
- (3) Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 8

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain memuat kondisi sebagai berikut:
  - a. kurang salur, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan; atau
  - b. lebih salur, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat per triwulan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2012

### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kurang/lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Gubernur menyampaikan perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dalam Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Rekomendasi kurang/lebih salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.
- (4) Rekomendasi kurang salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk kemudian disalurkan ke provinsi.

### Pasal 10

Dalam hal terdapat lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka:

- a. lebih salur tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a triwulan berikutnya; atau
- b. untuk Triwulan IV lebih salur tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya setelah memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

### Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Alokasi BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri ini termasuk alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran BOS dilakukan secara semesteran;
  - b. alokasi BOS tersebut merupakan bagian dari alokasi BOS per provinsi; dan
  - c. rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (4) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

## Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 201 /PMK.07/2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2012 PER PROVINSI

NO.	PROVINSI	BOS <sup>1)</sup>			DANA CADANGAN BOS <sup>2)</sup>			TOTAL		
		SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH
1	Acch	295.840.600.000	143.235.400.000	439.076.000.000	15.208.760.000	7.363.410.000	22.572.170.000	311.049.360.000	150.598.810.000	461.648.170.000
2	Sumatera Utara	1.055.329.720.000	444.829.910.000	1.500.159.630.000	54.254.940.000	22.866.260.000	77.121.200.000	1.109.584.660.000	467.696.170.000	1.577.280.830.000
3	Sumatera Barat	393.532.320.000	147.362.630.000	540.894.950.000	20.230.980.000	7.574.280.000	27.805.260.000	413.763.300.000	154.936.910.000	568.700.210.000
4	Riau	451.836.240.000	159.275.010.000	611.111.250.000	23.229.000.000	8.188.430.000	31.417.430.000	475.065.240.000	167.463.440.000	642.528.680.000
5	Kepulauan Riau	110.894.260.000	42.508.410.000	153.402.670.000	5.700.820.000	2.186.090.000	7.886.910.000	116.595.080.000	44.694.500.000	161.289.580.000
6	Jambi	238.931.580.000	85.421.520.000	324.353.100.000	12.283.240.000	4.391.350.000	16.674.590.000	251.214.820.000	89.812.870.000	341.027.690.000
7	Sumatera Selatan	544.909.420.000	229.354.140.000	774.263.560.000	28.014.000.000	11.790.260.000	39.804.260.000	572.923.420.000	241.144.400.000	814.067.820.000
8	Kep. Bangka Belitung	89.853.600.000	32.964.590.000	122.818.190.000	4.619.120.000	1.694.770.000	6.313.890.000	94.472.720.000	34.659.360.000	129.132.080.000
9	Bengkulu	132.564.220.000	60.798.720.000	193.362.940.000	6.815.000.000	3.125.420.000	9.940.420.000	139.379.220.000	63.924.140.000	203.303.360.000
10	Lampung	524.413.380.000	222.076.640.000	746.490.020.000	26.959.560.000	11.416.800.000	38.376.360.000	551.372.940.000	233.493.440.000	784.866.380.000
11	DKI Jakarta	482.788.520.000	243.951.740.000	726.740.260.000	24.820.520.000	12.550.850.000	37.371.370.000	507.609.040.000	256.502.590.000	764.111.630.000
12	Jawa Barat	2.804.806.340.000	1.175.516.470.000	3.980.322.810.000	144.192.060.000	60.432.360.000	204.624.420.000	2.948.998.400.000	1.235.948.830.000	4.184.947.230.000
13	Banten	719.240.020.000	276.110.480.000	995.350.500.000	36.975.580.000	14.193.610.000	51.169.190.000	756.215.600.000	290.304.090.000	1.046.519.690.000
14	Jawa Tengah	1.841.402.560.000	854.434.590.000	2.695.837.150.000	94.665.860.000	43.927.700.000	138.593.560.000	1.936.068.420.000	898.362.290.000	2.834.430.710.000
15	DI Yogyakarta	175.176.820.000	88.548.360.000	263.725.180.000	9.005.660.000	4.551.100.000	13.556.760.000	184.182.480.000	93.099.460.000	277.281.940.000
16	Jawa Timur	1.827.809.100.000	862.249.560.000	2.690.058.660.000	93.966.380.000	44.326.720.000	138.293.100.000	1.921.775.480.000	906.576.280.000	2.828.351.760.000
17	Kalimantan Barat	372.228.920.000	138.649.510.000	510.878.430.000	19.136.520.000	7.126.980.000	26.263.500.000	391.365.440.000	145.776.490.000	537.141.930.000
18	Kalimantan Tengah	171.235.140.000	61.859.460.000	233.094.600.000	8.803.820.000	3.179.380.000	11.983.200.000	180.038.960.000	65.038.840.000	245.077.800.000
19	Kalimantan Selatan	233.573.540.000	75.054.100.000	308.627.640.000	12.007.160.000	3.856.720.000	15.863.880.000	245.580.700.000	78.910.820.000	324.491.520.000
20	Kalimantan Timur	271.315.880.000	111.610.580.000	382.926.460.000	13.948.420.000	5.738.220.000	19.686.640.000	285.264.300.000	117.348.800.000	402.613.100.000
21	Sulawesi Utara	163.854.060.000	78.826.330.000	242.680.390.000	8.423.920.000	4.050.550.000	12.474.470.000	172.277.980.000	82.876.880.000	255.154.860.000
22	Gorontalo	83.924.840.000	31.759.010.000	115.683.850.000	4.314.040.000	1.633.000.000	5.947.040.000	88.238.880.000	33.392.010.000	121.630.890.000
23	Sulawesi Tengah	224.544.680.000	82.696.540.000	307.241.220.000	11.543.740.000	4.252.190.000	15.795.930.000	236.088.420.000	86.948.730.000	323.037.150.000
24	Sulawesi Selatan	611.144.260.000	269.638.120.000	880.782.380.000	31.419.180.000	13.861.330.000	45.280.510.000	642.563.440.000	283.499.450.000	926.062.890.000
25	Sulawesi Barat	104.882.560.000	41.187.810.000	146.070.370.000	5.391.680.000	2.117.930.000	7.509.610.000	110.274.240.000	43.305.740.000	153.579.980.000

(dalam rupiah)



NO.	PROVINSI	BOS <sup>1)</sup>			DANA CADANGAN BOS <sup>2)</sup>			TOTAL		
		SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH
26	Sulawesi Tenggara	203.389.180.000	84.671.050.000	288.060.230.000	10.456.820.000	4.352.300.000	14.809.120.000	213.846.000.000	89.023.350.000	302.869.350.000
27	Bali	243.638.860.000	125.998.020.000	369.636.880.000	12.525.100.000	6.477.330.000	19.002.430.000	256.163.960.000	132.475.350.000	388.639.310.000
28	Nusa Tenggara Barat	314.608.240.000	124.702.270.000	439.310.510.000	16.173.300.000	6.410.590.000	22.583.890.000	330.781.540.000	131.112.860.000	461.894.400.000
29	Nusa Tenggara Timur	492.549.340.000	187.052.340.000	679.601.680.000	25.320.480.000	9.616.240.000	34.936.720.000	517.869.820.000	196.668.580.000	714.538.400.000
30	Maluku	143.161.980.000	64.445.990.000	207.607.970.000	7.359.620.000	3.314.280.000	10.673.900.000	150.521.600.000	67.760.270.000	218.281.870.000
31	Maluku Utara	102.871.120.000	42.470.780.000	145.341.900.000	5.287.860.000	2.183.250.000	7.471.110.000	108.158.980.000	44.654.030.000	152.813.010.000
32	Papua	241.180.820.000	74.425.040.000	315.605.860.000	12.400.400.000	3.826.190.000	16.226.590.000	253.581.220.000	78.251.230.000	331.832.450.000
33	Papua Barat	81.694.740.000	28.303.440.000	109.998.180.000	4.200.360.000	1.454.790.000	5.655.150.000	85.895.100.000	29.758.230.000	115.653.330.000
<b>Total</b>		<b>15.749.126.860.000</b>	<b>6.691.988.560.000</b>	<b>22.441.115.420.000</b>	<b>809.653.900.000</b>	<b>344.030.680.000</b>	<b>1.153.684.580.000</b>	<b>16.558.780.760.000</b>	<b>7.036.019.240.000</b>	<b>23.594.800.000.000</b>

Catatan:

<sup>1)</sup> BOS yang disalurkan per triwulan sebesar 1/4 (satu per empat) dari Jumlah alokasi BOS

<sup>2)</sup> Dana Cadangan BOS akan disalurkan setelah ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W.MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 201 /PMK.07/2011  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL  
 SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

### FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN

KOP  
 KEPALA  
 DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
 TAHUN ANGGARAN 2012  
 PROVINSI ... <sup>(1)</sup>  
 TRIWULAN ... <sup>(2)</sup>

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Triwulan I	: Rp	(3)
- Triwulan II	: Rp	(4)
- Triwulan III	: Rp	(5)
- Triwulan IV	: Rp	(6)
- Jumlah	: Rp	(7)

Realisasi Penyaluran ke Sekolah melalui SP2D Provinsi

- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya	: Rp	(8)
- Triwulan ini	: Rp	(9)
- Kumulatif s.d Triwulan ini	: Rp	(10)

Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah : Rp (11)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat <sup>(12)</sup>, Tanggal <sup>(13)</sup>  
 Gubernur .... <sup>(14)</sup>

(tanda tangan asli dan stempel basah) <sup>(15)</sup>

Nama <sup>(16)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYALURAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi.
2	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi transfer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
4	Diisi transfer BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
5	Diisi transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah triwulan III.
6	Diisi transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV
7	Diisi jumlah transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (nomor 3+4+5+6)
8	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan sebelumnya.
9	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan berkenaan (harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 pada triwulan berkenaan).
10	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan sebelumnya dengan triwulan berkenaan. (nomor 8+9).
11	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah. (nomor 10-7)
12	Diisi tempat dibuatnya laporan.
13	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
14	Diisi nama provinsi.
15	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
16	Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W.MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 201 /PMK.07/2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

## FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP  
KEPALA  
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur ..... menyatakan telah merealisasikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah pada Triwulan .... dalam Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....  
Gubernur

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W.MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 201 /PMK.07/2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

FORMAT DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
YANG DITERBITKAN UNTUK PENYALURAN

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)  
YANG DITERBITKAN UNTUK PENYALURAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2012  
TRIWULAN ....

No.	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
	Jumlah			

Tempat, tanggal ...  
Kepala Biro/Dinas/Bagian<sup>1)</sup>

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...  
NIP ...

Catatan:

<sup>1)</sup>Diisi sesuai dengan nomenklatur instansi pengelola keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W.MARTOWARDOJO